

**PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK DAN EFIKASI POLITIK TERHADAP
PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PESERTA KEGIATAN FASILITASI
BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT**

Fajar Noor Ramadhian^{1(a)}, Asrinaldi^{2(b)}, Aidinil Zetra^{3(c)}

^{1,2,3}*Program Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas*
^{a)}*katanafame@gmail.com*

**INFORMASI
ARTIKEL**

Article History:

Dikirim:

26-09-2025

Diterbitkan Online:

30-09-2025

Kata Kunci:

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Efikasi Politik, Partisipasi Politik, Pendidikan Politik

Keywords:

Kesbangpol Agency of West Sumatra Province, Political Efficacy, Political Participation, Political Education

Corresponding Author:

katanafame@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1392>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik yang dimediasi efikasi politik. Penelitian ini menitikberatkan pada bentuk-bentuk partisipasi politik sesuai teori Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian 400 responden yang dipilih secara *simple random sampling*. Data dianalisis menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan program SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pendidikan politik dan efikasi politik secara simultan berkontribusi sebesar 47% terhadap partisipasi politik, sedangkan sisanya (53%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Rata-rata tingkat partisipasi politik setelah kegiatan fasilitasi pendidikan politik tergolong Tinggi, dengan nilai rerata 3,74 (setara 74,80%). Kedua, hasil penelitian ini merekomendasikan upaya pendidikan politik berkelanjutan untuk memperkuat keterlibatan demokratis dalam masyarakat. Ketiga, penting bagi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat memperhatikan subjek pendidikan politik yang dilaksanakan dari aspek umur, tingkat pendidikan, pendapatan per bulan, dan karakter sosial lainnya.

ABSTRACT

This study examines the influence of political education on political participation, which is mediated by political efficacy. This study focuses on the forms of political participation according to the theory of Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson. The approach used is quantitative with a survey method. The research sample of 400 respondents was selected by simple random sampling. Data were analyzed using path analysis techniques with the help of the SPSS program version 24. The results of the study show: First, political education and political efficacy simultaneously contribute 47% to political participation, while the remaining 53% is influenced by other variables not studied. The average level of political participation after the political education facilitation activities is classified as high, with a mean value of 3.74 (equivalent to 74.80%). Second, the results of this study recommend ongoing political education efforts to strengthen democratic involvement in society. Third, it is important for the West Sumatra Provincial Kesbangpol Agency to pay attention to the subject of political education implemented from the aspects of age, education level, monthly income, and other social characteristics.

PENDAHULUAN

Partisipasi politik dalam sebuah negara demokrasi menjadi suatu komponen yang substansial. Hal ini menjadi alasan mendasar untuk menentukan tinggi-rendah kualitas masyarakat dalam negara demokrasi. Partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan seseorang maupun sekelompok orang, untuk ikut secara aktif dalam berkehidupan politik. Kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum (pemilu), ikut serta dalam rapat umum, berhubungan dengan pemerintah atau anggota parlemen, serta aktivitas lainnya. Partisipasi politik berhubungan erat untuk kesejahteraan, sebab partisipasi politik dibutuhkan dalam pemecahan berbagai permasalahan seperti: kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perekonomian (Sunaryo, 2019).

Secara manfaat partisipasi politik menjadi saluran bagi warga negara agar terlaksananya pengambilan kebijakan (Verba, Schlozman, & Brady, 1995). Interaksi di dalam negara demokrasi membutuhkan *political will* dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah hingga Desa dalam melakukan pembangunan manusia melalui pendekatan pendidikan politik. Pelibatan masyarakat yang ada di daerah agar dapat berpartisipasi ke dalam kehidupan politik, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan cepat. Namun membutuhkan upaya yang kuat, dan juga memakan waktu yang lama bagi pemerintah daerah. Sehingga, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Substansi aturan ini memainkan peran pemerintah dalam melakukan pendidikan politik serta keterlibatan elit politik, segmen masyarakat, maupun lembaga demokrasi.

Pandangan tentang pentingnya untuk melakukan kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk memajukan etika dan budaya politik. Pendidikan politik diyakini mampu memberikan orientasi budaya politik partisipatif dengan memperhatikan etika dalam berpolitik. Tentunya Pemerintah Pusat menggunakan unsur penting pada Pemerintah Daerah yang dalam konteks ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi, sebagaimana yang tertuang di dalam Permendagri No. 36 Tahun 2010 pada Bab VI Pelaksana Fasilitasi (pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12) dan Bab VII Monitoring,

Evaluasi, dan Pelaporan (pasal 13, dan pasal 14). Pendidikan politik bukan hanya sekedar tentang pengetahuan, melainkan tentang *skill* (keterampilan) dalam mengakses, mengomparasi, dan mengkomunikasikan kepada orang lain dikarenakan sikap politik individu lebih otonom, dan berlandaskan kemampuan nalar.

Pasal 7 Permendagri No. 36 Tahun 2010 menempatkan sasaran penyelenggaraan pendidikan politik meliputi: a). partai politik; b). partai politik lokal; c). organisasi kemasyarakatan; d). lembaga nirlaba lainnya; dan e). lembaga atau instansi vertikal di daerah. Dengan adanya pendidikan politik diharapkan mampu menumbuhkan keyakinan diri (*self efficacy*) untuk mengerti nilai-nilai, dan memiliki keahlian dalam mengaktualisasikan, memberdayakan, dan melestarikan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Bandura, *self efficacy* merupakan bagian dari teori kognitif sosial (Bandura, 2011). Teori ini merujuk kepada keyakinan individu akan kemampuannya dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya. *Self efficacy* dapat menciptakan lingkaran positif, dan menciptakan keyakinan diri yang tinggi sehingga mampu mencapai tujuannya melalui tindakan yang dilakukannya.

Hematnya, efikasi politik merupakan keyakinan terhadap diri untuk mampu dalam mempengaruhi politik pada situasi tertentu. Efikasi politik memiliki dua jenis, yakni; pertama, efikasi internal yaitu kepercayaan bahwa seseorang dapat memahami politik dan karenanya berpartisipasi dalam politik. Kedua, efikasi eksternal yakni percaya bahwa pemerintah akan menanggapi tuntutan seseorang (Wibowo, Rahmawan, & Syafaat, 2020). Pembuktian terhadap adanya hubungan antara pendidikan politik, efikasi politik, dan juga partisipasi politik dilakukan dengan menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya.

Kajian tentang pendidikan politik di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa konteks sosial, budaya, dan kelembagaan daerah sangat memengaruhi efektivitas program pendidikan politik. Misalnya, penelitian (Limilia & Fuady, 2017) di Yogyakarta menemukan bahwa pendidikan politik berbasis komunitas memiliki dampak signifikan dalam membangun kesadaran politik warga muda, terutama melalui organisasi sosial-keagamaan. Di Kalimantan Selatan, penelitian oleh (Sari & Rahmadi, 2021)

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat meningkat ketika pendidikan politik diselenggarakan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, studi di Bali oleh (Wirawan, 2020) menekankan pentingnya integrasi nilai budaya lokal dalam pendidikan politik agar pesan demokrasi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Temuan-temuan ini memperkaya pemahaman bahwa pendidikan politik di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sosial budaya setempat.

Secara internasional, pendidikan politik telah lama dianggap sebagai fondasi penguatan partisipasi warga dalam sistem demokrasi. Studi yang dilakukan oleh (Niemi & Junn, 1988) di Amerika Serikat serta (Print & Lange, 2012) di Australia menunjukkan bahwa pendidikan politik (*civic education*) yang terintegrasi dalam kebijakan publik mampu meningkatkan kepercayaan politik dan efikasi politik warga. Organisasi seperti (International IDEA, 2020) dan (OECD, 2018) juga menegaskan pentingnya pelibatan pemerintah lokal dalam menyediakan program pendidikan politik yang kontekstual dan berkelanjutan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa praktik pendidikan politik di daerah seperti Sumatera Barat memiliki relevansi global, di mana model kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memperkuat partisipasi politik.

Lembaga pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat partisipasi politik masyarakat melalui kebijakan pendidikan politik yang terencana dan berkesinambungan. Dalam konteks Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat

provinsi dan kabupaten/kota menjadi ujung tombak implementasi pendidikan politik sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 36 Tahun 2010. Hasil kajian (Setiawan, 2022) menyebutkan efektivitas pendidikan politik daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana Kesbangpol mampu mengintegrasikan materi pendidikan politik dengan isu-isu lokal yang aktual, seperti transparansi anggaran, partisipasi dalam musrenbang, dan pengawasan kebijakan publik. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas kelembagaan Kesbangpol menjadi aspek penting dalam mendorong partisipasi politik masyarakat di daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena prosedur penelitian yang dijalankan dengan cara mengolah data-data yang bersifat angka (kuantifikasi) baik primer maupun sekunder. Sedangkan desain penelitian berbentuk survei dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1989, p. 3). Desain survei ini digunakan untuk memperoleh data primer mengenai tingkat pendidikan politik, efikasi politik, serta partisipasi politik peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik oleh Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* antara skor butir pertanyaan dengan skor total variabel. Tabel berikut memperlihatkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas keseluruhan instrumen penelitian:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel Pendidikan Politik				
No	Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	X1_1	,896	0,098	Valid
2	X1_2	,910		
3	X1_3	,917		
4	X1_4	,907		
5	X1_5	,893		
6	X1_6	,852		
Variabel Efikasi Politik				
1	Z2_1	,733	0,098	Valid
2	Z2_2	,798		
3	Z2_3	,801		
4	Z2_4	,795		
5	Z2_5	,798		
6	Z2_6	,736		

7	Z2_7	,742		
8	Z2_8	,727		
9	Z2_9	,750		
10	Z2_10	,716		
11	Z2_11	,720		
12	Z2_12	,734		
Variabel Partisipasi Politik				
1	Y_1	,394**		
2	Y_2	,635**		
3	Y_3	,597**		
4	Y_4	,666**		
5	Y_5	,662**		
6	Y_6	,701**	0,098	Valid
7	Y_7	,764**		
8	Y_8	,654**		
9	Y_9	,760**		
10	Y_10	,731**		
11	Y_11	,769**		
12	Y_12	,825**		

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel Pendidikan Politik		
Cronbach Alpha's	N of Items	Keterangan
.901	12	Reliabel
Variabel Efikasi Politik		
Cronbach Alpha's	N of Items	Keterangan
.956	6	Reliabel
Variabel Partisipasi Politik		
Cronbach Alpha's	N of Items	Keterangan
.938	12	Reliabel

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Instrumen penelitian ini disusun berdasarkan dimensi teoritik yang dikembangkan dari literatur sebelumnya, dan disesuaikan dengan konteks penelitian lokal di Provinsi Sumatera Barat. Pendidikan politik (X) diukur melalui tiga indikator utama, yaitu: pemahaman terhadap konsep dan sistem politik, kesadaran terhadap hak dan kewajiban politik, serta sikap ambil bagian dalam kegiatan politik. Efikasi politik (Y) diukur melalui dua dimensi, yaitu efikasi internal dan efikasi eksternal (Barrett & Pachi, 2019; Lane, 1959). Efikasi internal dan eksternal masing-masing memiliki 6 butir pertanyaan. Adapun variabel partisipasi politik (Z) dikonstruksi berdasarkan lima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (1994), dengan dua belas item pertanyaan yang memungkinkan pengukuran partisipasi politik secara lebih komprehensif

dan kontekstual terhadap realitas sosial masyarakat Sumatera Barat. Hasil uji validitas dan reliabilitas ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk penelitian memiliki tingkat konsistensi dan keandalan yang memadai untuk mengukur hubungan antar variabel penelitian. Setiap indikator diukur menggunakan skala Likert yang terbagi menjadi lima poin dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa karakteristik sosial yang digunakan dalam kuesioner penelitian antara lain: umur; jenis kelamin; pendidikan yang pernah ditempuh; pekerjaan; rata-rata penghasilan kotor/ per bulan; etnis/suku; serta status pernikahan. Karakteristik responden penelitian digambarkan dalam sejumlah tabel berikut ini:

Tabel 3. Responden Berdasarkan Umur

Umur	Aspek				
	Frekuensi	Persentase	Pendidikan Politik	Efikasi Politik	Partisipasi Politik
20 – 24 tahun	25	6,25%	3,11	3,21	3,30
25 – 29 tahun	44	11%	3,61	3,71	3,57
30 – 34 tahun	66	16,5%	3,71	3,78	3,60
35 – 39 tahun	78	19,5%	3,77	3,80	3,70
40 – 49 tahun	81	20,25%	4,01	3,96	3,88
50 – 59 tahun	93	23,25%	4,17	4,08	3,90
60 – 64 tahun	10	2,5%	4,12	4,08	4,06
≥ 65 tahun ke atas	3	0,75%	4,94	4,50	4,36
Total/Rata-rata	400	100%	3,86	3,86	3,74

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas responden penelitian lebih didominasi oleh peserta dengan kelompok umur 50 – 59 tahun sebanyak 93 orang (23,25%) dari keseluruhan responden. Ditinjau dari hasil pengukuran rata-rata terhadap tiga variabel penelitian responden dengan umur ≥ 65 tahun ke atas ternyata memiliki tingkat pendidikan, efikasi, dan partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Hal ini terlihat dari perolehan rata-rata skor responden dengan latar belakang umur tersebut, yang berada di rentang 4,36 hingga 4,94 yang secara kualitatif berpasangan dengan kategori sangat tinggi.

Asumsinya, responden dengan umur tersebut lebih cenderung matang/dewasa dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik sehingga lebih cenderung untuk berpartisipasi. Karena responden dengan kelompok umur tersebut sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Khususnya, yang berasal dari sistem dan kehidupan politik yang sudah ada dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Untuk membuktikan asumsi tersebut maka perlu melihat hasil uji korelasi, antara umur dengan setiap variabel penelitian yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Korelasi Spearman dan Pearson Umur dengan Variabel Penelitian

Variabel	Korelasi		Tingkat Hubungan	Keterangan
	Spearman	Pearson		
Umur				
Pendidikan politik	,391	,407	Rendah – Sedang	Positif
Efikasi politik	,335	,352	Rendah – Rendah	
Partisipasi politik	,303	,299	Rendah – Rendah	

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keeratan hubungan antara umur dengan tiap-tiap variabel penelitian, berada pada klasifikasi yang rendah hingga sedang serta bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan umur yang dialami responden ternyata memiliki pengaruh yang

positif namun rendah hingga sedang terhadap peningkatan pendidikan politik, efikasi politik, dan partisipasi politik responden. Meskipun begitu pada korelasi Pearson terlihat tingkat hubungan yang sedang antara umur dengan pendidikan politik dengan nilai korelasi sebesar ,407.

Tabel 5. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Aspek	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Frekuensi	172	228	400
Persentase	43%	57%	100%
Pendidikan Politik	4,15	3,64	3,86

Efikasi Politik	4,05	3,72	3,86
Partisipasi Politik	3,83	3,67	3,74

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas responden penelitian lebih didominasi oleh peserta dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 228 orang, atau setara dengan 57%. Sedangkan responden laki-laki hanya sebanyak 172 orang atau setara dengan 43%. Ditinjau dari hasil pengukuran rata-rata terhadap tiga variabel penelitian, responden dengan jenis kelamin laki-laki ternyata memiliki tingkat pendidikan, efikasi, serta partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini terlihat dari perolehan rata-rata skor responden laki-laki yang berada di rentang angka 3,83 hingga 4,15

yang secara kualitatif berpasangan dengan kategori tinggi dan sangat tinggi.

Asumsinya, di dalam kehidupan sehari-hari keputusan-keputusan yang bersifat politis dalam masyarakat Sumatera Barat justru dilimpahkan kepada kaum atau pihak laki-laki nya. Meski daerah Sumatera Barat masih identik dengan etnis/suku Minangkabau, serta menganut paham garis keturunan dari pihak Ibu (matrilineal) nya. Hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa tingkat pendidikan, efikasi, serta partisipasi politik kaum perempuan nya juga akan lebih tinggi dari kaum laki-lakinya.

Tabel 6. Responden Berdasarkan Pendidikan yang pernah ditempuh

Pendidikan	Aspek				
	Frekuensi	Persentase	Pendidikan Politik	Efikasi Politik	Partisipasi Politik
Tamat SD/Sederajat	6	1,5%	3,86	3,86	3,94
Tamat SMP/Sederajat	33	8,25%	3,77	3,70	3,66
Tamat SMA/Sederajat	221	55,25%	3,80	3,79	3,73
Diploma/Sarjana	126	31,5%	3,92	3,97	3,73
Pascasarjana (S2/S3)	14	3,5%	4,50	4,30	4,02
Total/Rata-rata	400	100%	3,86	3,86	3,74

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas responden penelitian lebih didominasi oleh peserta dengan Pendidikan yang pernah ditempuh Tamat SMA/Sederajat sebanyak 221 orang (55,25%). Responden dengan jumlah terkecil adalah Tamat SD/Sederajat, yang hanya berjumlah 6 (1,5%) dari keseluruhan responden. Ditinjau dari hasil pengukuran rata-rata terhadap tiga variabel penelitian responden dengan latar belakang Pendidikan yang pernah ditempuh Pascasarjana (S2/S3) ternyata memiliki tingkat pendidikan, efikasi, dan partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan latar belakang pendidikan lainnya.

Hal ini terlihat dari perolehan rata-rata skor responden dengan latar belakang pendidikan tersebut yang berada di rentang 4,02 hingga

4,50 yang secara kualitatif berpasangan dengan kategori tinggi dan sangat tinggi. Asumsinya, responden dengan pendidikan yang pernah ditempuh lebih tinggi, akan lebih cenderung untuk berpartisipasi. Karena, memiliki pemahaman terhadap konteks dan dinamika politik yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Sehingga, untuk dapat merespon secara tepat dan benar membutuhkan tingkat pendidikan yang pernah ditempuh, yang seyogyanya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Untuk membuktikan asumsi tersebut maka perlu melihat hasil uji korelasi, antara pendidikan yang pernah ditempuh dengan setiap variabel penelitian yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Hasil Korelasi Spearman dan Pearson Pendidikan yang pernah ditempuh dengan Variabel Penelitian

Variabel Pendidikan yang pernah ditempuh	Korelasi		Tingkat Hubungan	Keterangan
	Spearman	Pearson		
Pendidikan politik	,135	,145	Sangat Rendah – Sangat Rendah	Positif
Efikasi politik	,205	,190	Rendah – Sangat Rendah	
Partisipasi politik	,018	,042	Sangat Rendah – Sangat Rendah	

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keeratan hubungan antara pendidikan yang ditempuh, dengan tiap-tiap variabel penelitian berada pada klasifikasi yang sangat rendah hingga rendah serta bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jenjang pendidikan yang dialami memiliki pengaruh yang positif namun sangat

rendah hingga rendah terhadap peningkatan pendidikan politik, efikasi politik, dan partisipasi politik responden. Meskipun begitu pada korelasi Spearman terlihat tingkat hubungan yang rendah antara umur dengan pendidikan politik dengan nilai korelasi sebesar ,205.

Tabel 8. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Aspek				
	Frekuensi	Persentase	Pendidikan Politik	Efikasi Politik	Partisipasi Politik
Tidak bekerja/ Pengangguran	3	0,75%	2,56	2,78	2,86
Ibu Rumah Tangga	71	17,75%	3,63	3,72	3,71
Pelajar/Mahasiswa	18	4,5%	3,10	3,14	3,29
Petani/Pekebun/Peternak/ Peladang	41	10,5%	3,94	3,89	3,88
Pekerjaan informal lainnya (Ojek/Ojol/Supir/Buruh Harian, dll)	33	8,25%	3,66	3,69	3,70
Tenaga Honoror (Tenaga Honor/Guru Honor/Guru Mengaji/Garin, dll)	46	11,5%	3,78	3,95	3,94
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	6	1,5%	4,56	4,17	4,01
Karyawan Swasta/BUMN/BUMD	57	14,25%	3,80	3,70	3,39
Pelaku UMKM	10	2,5%	3,82	3,83	3,93
Wiraswasta/Wirusaha	75	18,75%	4,30	4,10	3,91
Pedagang	10	2,5%	3,98	3,96	3,85
ASN/PNS/PPPK	21	5,25%	3,98	4,41	3,65
Lainnya	9	2,25%	4,24	4,32	4,19
Total/Rata-rata	400	100%	3,86	3,86	3,74

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas responden penelitian lebih didominasi oleh peserta dengan Pekerjaan Wiraswasta/Wirusaha sebanyak 75

orang atau setara dengan 18,75%. Responden dengan jumlah terkecil adalah Tidak bekerja/Pengangguran, yang hanya berjumlah 3

orang atau setara dengan 0,75% dari keseluruhan responden. Ditinjau dari hasil pengukuran rata-rata terhadap tiga variabel penelitian, responden dengan pekerjaan Lainnya ternyata memiliki tingkat pendidikan, efikasi, dan partisipasi politik yang lebih tinggi

dibandingkan dengan latar belakang pekerjaan lainnya. Hal ini terlihat dari perolehan rata-rata skor responden dengan latar belakang pendidikan tersebut yang berada di rentang 4,19 hingga 4,32 yang secara kualitatif berpasangan dengan kategori Tinggi dan Sangat Tinggi.

Tabel 9. Responden Berdasarkan Rata-rata Penghasilan Kotor/ Bulan

Penghasilan	Aspek				
	Frekuensi	Persentase	Pendidikan Politik	Efikasi Politik	Partisipasi Politik
< Rp. 500.000,-	1	0,25%	2,17	2,58	2,33
Rp. 501.000,- s/d Rp. 999.000,-	13	3,25%	2,91	3,12	3,12
Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.999.000,-	149	37,25%	3,67	3,71	3,74
Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.999.000,-	170	42,5%	3,92	3,92	3,71
Rp. 4.000.000,- atau lebih	67	16,75	4,33	4,21	3,96
Total/Rata-rata	400	100%	3,86	3,86	3,74

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas responden penelitian lebih didominasi oleh peserta dengan Penghasilan kotor per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.999.000,- sebanyak 170 orang (42,5%). Responden dengan jumlah terkecil adalah dari latar belakang penghasilan kotor per bulan sebesar < Rp. 500.000,- yang hanya berjumlah 1 orang (0,25%) dari keseluruhan responden. Ditinjau dari hasil pengukuran rata-rata terhadap tiga variabel penelitian, responden dengan penghasilan kotor per bulan sebesar < Rp. 4.000.000,- atau lebih ternyata memiliki tingkat pendidikan, efikasi, dan partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan kotor per bulan lainnya. Hal ini terlihat dari perolehan rata-rata skor responden dengan latar belakang penghasilan kotor per bulan tersebut yang berada di rentang 3,96 hingga 4,33 yang secara

kualitatif berpasangan dengan kategori tinggi dan sangat tinggi.

Asumsinya, responden dengan latar belakang penghasilan kotor per bulan tersebut lebih cenderung untuk berpartisipasi. Karena, untuk dapat terlibat secara aktif di dalam kehidupan politik, juga membutuhkan biaya (*cost*) yang tidak sedikit. Apabila seseorang masih sibuk dengan aktivitas pemenuhan kehidupan sehari-hari tentu waktu yang dapat mereka alokasikan untuk urusan politik, menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan yang sudah memiliki penghasilan memadai/cukup. Untuk membuktikan asumsi tersebut maka perlu melihat hasil uji korelasi, antara pendidikan yang pernah ditempuh dengan setiap variabel penelitian yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Hasil Korelasi Spearman dan Pearson Rata-rata Penghasilan Kotor Per Bulan dengan Variabel Penelitian

Variabel Rata-rata Penghasilan Kotor Per Bulan	Korelasi		Tingkat Hubungan	Keterangan
	Spearman	Pearson		
Pendidikan politik	,379	,419	Rendah – Sedang	Positif
Efikasi politik	,347	,381	Rendah – Rendah	
Partisipasi politik	,152	,187	Sangat Rendah – Sangat Rendah	

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keeratan hubungan antara rata-rata penghasilan kotor per bulan, dengan tiap-tiap variabel penelitian berada pada klasifikasi yang sangat rendah hingga sedang serta bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penghasilan kotor per bulan yang dialami memiliki pengaruh yang positif namun

berada di klasifikasi sangat rendah hingga sedang terhadap peningkatan pendidikan politik, efikasi politik, dan partisipasi politik responden. Meskipun begitu pada korelasi Pearson terlihat tingkat hubungan yang sedang antara rata-rata penghasilan kotor per bulan dengan pendidikan politik dengan nilai korelasi sebesar ,419**.

Tabel 11. Responden Berdasarkan Etnis/Suku

Etnis/Suku	Aspek				
	Frekuensi	Persentase	Pendidikan Politik	Efikasi Politik	Partisipasi Politik
Minangkabau	364	91%	3,84	3,83	3,72
Jawa	23	5,75%	4,04	4,04	3,90
Sunda	3	0,75%	4,00	4,06	4,06
Melayu	8	2%	4,29	4,35	3,93
Mandailing	1	0,25%	3,67	4,50	3,75
Tionghoa	1	0,25%	3,00	4,50	3,75
Total/Rata-rata	400	100%	3,86	3,86	3,74

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas responden penelitian lebih didominasi oleh peserta dengan etnis/suku Minangkabau sebanyak 364 orang atau setara dengan 91%. Responden dengan etnis/suku yang paling sedikit adalah Mandailing dan Tionghoa, dengan banyaknya masing-masing 1 orang atau setara dengan 0,25% dari keseluruhan responden. Ditinjau dari hasil pengukuran rata-rata terhadap tiga variabel penelitian, responden dengan latar

belakang etnis/suku Melayu ternyata memiliki tingkat pendidikan, efikasi, dan partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden dari etnis/suku lainnya. Hal ini terlihat dari perolehan rata-rata skor responden dengan latar belakang etnis/suku tersebut yang berada di rentang 3,93 hingga 4,35 yang secara kualitatif berpasangan dengan kategori Tinggi dan Sangat Tinggi.

Tabel 12. Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Status Pernikahan	Aspek				
	Frekuensi	Persentase	Pendidikan Politik	Efikasi Politik	Partisipasi Politik
Belum menikah	69	17,25%	3,48	3,51	3,45
Menikah	297	74,25%	3,92	3,93	3,79
Pernah menikah (Duda/Janda)	34	8,5%	4,11	3,94	3,89
Total/Rata-rata	400	100%	3,86	3,86	3,74

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas responden penelitian lebih didominasi oleh peserta dengan status pernikahan Menikah sebanyak 297 orang atau setara dengan 74,25%. Secara berurutan latar belakang status pernikahan responden adalah Menikah sebanyak 297 orang atau setara dengan 74,25%; Belum Menikah sebanyak 69 orang atau setara dengan 17,25%; dan Pernah menikah (Duda/Janda) sebanyak 34 orang atau setara dengan 8,5%. Ditinjau dari hasil

pengukuran rata-rata terhadap tiga variabel penelitian, responden dengan latar belakang status pernikahan Pernah menikah (Duda/Janda) ternyata lebih memiliki tingkat pendidikan, efikasi, dan partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan status pernikahan lainnya. Hal ini terlihat dari perolehan rata-rata skor responden dengan latar belakang status pernikahan tersebut yang berada di rentang 3,89 hingga 4,11 yang secara

kualitatif berpasangan dengan kategori Tinggi dan Sangat Tinggi.

Tabel 13. Responden Berdasarkan Asal Domisili

Asal Domisili	Aspek				
	Frekuensi	Persentase	Pendidikan Politik	Efikasi Politik	Partisipasi Politik
Kab. Agam	18	4,5%	3,81	3,75	3,67
Kab. Dharmasraya	3	0,75%	4,22	4,14	4,11
Kab. Kep. Mentawai	2	0,5%	3,58	3,21	3,58
Kab. Limapuluh Kota	64	16%	3,88	3,88	3,81
Kab. Padang Pariaman	49	12,25%	3,77	3,76	3,64
Kab. Pasaman Barat	16	4%	4,01	4,14	4,12
Kab. Pesisir Selatan	32	8%	3,90	3,70	3,71
Kab. Solok	51	12,75%	3,95	4,01	3,90
Kab. Solok Selatan	21	5,25%	3,83	4,01	3,58
Kab. Tanah Datar	23	5,75%	3,64	3,71	3,63
Kota Padang	58	14,5%	3,94	3,96	3,69
Kota Pariaman	7	1,75%	4,43	4,33	4,39
Kota Payakumbuh	46	11,5%	3,66	3,64	3,59
Kota Solok	10	2,5%	4,00	3,88	3,67
Total/Rata-rata	400	100%	3,86	3,86	3,74

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden penelitian lebih didominasi oleh peserta yang berasal dari daerah Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak 64 orang atau setara dengan 16%. Responden dengan jumlah terkecil berasal dari asal domisili Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 2 orang atau setara dengan 0,5% dari keseluruhan responden. Ditinjau dari hasil pengukuran rata-rata terhadap tiga variabel penelitian, responden dengan latar belakang asal domisili Kabupaten Dharmasraya ternyata memiliki tingkat pendidikan, efikasi, dan partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan asal domisili lainnya. Hal ini terlihat dari perolehan rata-rata skor responden dengan latar belakang asal domisili tersebut yang berada di rentang 4,11 hingga 4,22 yang secara kualitatif berpasangan dengan kategori Tinggi dan Sangat Tinggi.

Tingkat Partisipasi Politik Peserta Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Tingkat partisipasi politik peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam penelitian ini, dikonstruksi dan diukur dari lima indikator bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson, dengan menggunakan dua belas item butir pertanyaan. Menurut

Huntington dan Nelson partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah (Huntington & Nelson, 1994). Artinya, partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahap kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan tersebut.

Partisipasi politik peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dirumuskan sebagai: ikut serta dalam pemilu sebagai pemilih; menghadiri kampanye politik atau kegiatan partai; pernah menjadi anggota atau pengurus organisasi politik; berpartisipasi dalam musyawarah warga atau forum RT/RW terkait kebijakan lokal; menghubungi anggota DPRD atau pejabat untuk menyampaikan pendapat atau keluhan; menandatangani petisi politik, baik *online* maupun *offline*; mengikuti demonstrasi atau aksi damai untuk menyuarakan pendapat politik; menyampaikan opini politik melalui media sosial (posting, komentar, atau berbagi konten); ikut serta dalam diskusi atau webinar tentang isu-isu politik; ikut serta dalam kegiatan organisasi masyarakat sipil atau LSM yang fokus pada isu politik atau kebijakan publik; terlibat dalam

penyusunan atau advokasi kebijakan di tingkat komunitas; serta menjadi bagian aktif dari perubahan sosial melalui jalur politik.

Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa, tingkat partisipasi politik peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berada dalam kategori tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan politik dan tingkat efikasi politik yang juga sama-sama berkategori tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan juga ditemukan bahwa: semakin tinggi tingkat pendidikan yang pernah ditempuh seorang peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik, maka akan berpengaruh pula pada semakin tingginya tingkat efikasi politik yang mereka miliki. Serta, dengan semakin tingginya tingkat efikasi politik yang dimiliki akan berpengaruh pula pada tingkat partisipasi politik yang dimiliki.

Peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tingkat pendidikan dengan kategori tinggi, yakni: Pascasarjana (S2/S3) ternyata memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi, dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lainnya. Tingginya tingkat partisipasi politik tersebut dipengaruhi oleh tingginya tingkat efikasi politik, yang terbentuk sebagai pengaruh dari tingginya tingkat pendidikan yang pernah ditempuh. Hal ini juga bersumber dari kontribusi kegiatan fasilitasi pendidikan politik, yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Solijonov, 2016; Hendrik, 2010; Mas'oed & Andrews, 2008) bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yang terbagi menjadi: faktor sosial ekonomi (ukuran populasi, stabilitas populasi, perkembangan ekonomi); faktor politik (kedekatan menuju tempat pemilihan, persepsi terhadap isu politik yang sedang berkembang, pelaksanaan kampanye, perpecahan dalam politik); faktor kelembagaan (sistem pemilu, pemungutan suara wajib, pemilu terkini/terbaru, persyaratan pendaftaran, susunan pemilu); dan juga faktor individual (umur, pendidikan, kepentingan politik, tanggung jawab kewarganegaraan).

Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Peserta Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terungkap bahwa tingkat pendidikan politik berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Pendidikan politik dalam penelitian ini dikonstruksi dan diukur dari tiga indikator pendidikan, yakni: pemahaman, kesadaran, dan sikap ambil bagian dalam politik dengan menggunakan enam butir item pertanyaan. Kartini Kartono (1996:64) mendefinisikan bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis, untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/ moral dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya (Kartono, 1996).

Pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dibuktikan dengan penolakan terhadap H_{02} , yaitu: tidak ada pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pendidikan politik telah terbukti secara signifikan, mempengaruhi partisipasi politik peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Sehingga, H_{a2} penelitian yakni: ada pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik diterima.

Pendidikan politik yang diterima para peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, telah membentuk konfigurasi akan pemahaman, kesadaran, serta sikap ambil bagian terhadap sistem dan kehidupan politik yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman akan sistem dan kehidupan politik dari peserta tercermin dari memahami apa makna politik, serta mampu menguraikan peran politik bagi kehidupan di tengah masyarakat. Kesadaran akan sistem dan kehidupan politik tercermin melalui selalu mengikuti isu-isu politik yang terjadi dilingkungan sekitar, dan sadar akan dinamika politik yang sedang terjadi baik di tingkat lokal maupun nasional. Sementara sikap ambil bagian terhadap sistem dan kehidupan politik tercermin melalui aktif mengikuti diskusi atau forum mengenai isu-isu

politik, maupun terlibat dalam kegiatan atau acara yang berkaitan dengan politik.

Tingginya tingkat pendidikan politik peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 juga dipengaruhi oleh pendidikan yang pernah ditempuh. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang pernah ditempuh para peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan politiknya. Begitu pun sebaliknya, semakin rendah pendidikan yang pernah ditempuh maka semakin rendah pula tingkat pendidikan politik yang dapat dimilikinya.

Menurut (Solijonov, 2016; Hendrik, 2010; Mas'od & Andrews, 2008) partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh beragam faktor. Diantara beragam faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat tersebut, tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi partisipasi politiknya. Bahkan, masyarakat merasa lebih berhak berpartisipasi dalam kegiatan politik ketika mereka berasal dari kalangan sosial, dan jenjang pendidikan yang tinggi. Limilia dan Fuady (2017) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan politik masyarakat yang rendah cenderung menciptakan persepsi terhadap partisipasi politik sebagai kegiatan yang berorientasi pada kepentingan pihak tertentu, baik pada saat pemberian hak suara hingga melakukan penggalangan dana (Gani, Daud, & Ridfah, 2022).

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka praktis terdapat keterkaitan antara pendidikan politik dengan partisipasi politik. Kartini Kartono (1996) menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi dalam tujuan dan fungsi suatu pendidikan politik yang dilakukan, yakni: pembentukan pemahaman terhadap politik, kesadaran terkait politik, serta sikap ambil bagian dalam kehidupan politik (Kartono, 1996). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian (Gani, Daud, & Ridfah, 2022) tentang efektifitas modul pendidikan politik terhadap peningkatan efikasi politik dan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Barru. Penelitian yang dilakukan Gani, dkk tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor dari kelompok siswa sebelum (*pre test*) dan sesudah (*post test*) diberikan materi terkait politik menggunakan modul yang dilatihkan. Hasil penelitian ini juga didukung

temuan dari (Nasuha & Cholikh, 2019) yang menyebutkan apabila intensitas pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, maka akan meningkatkan pula korelasi dari yang semula sedang ($R = 0,582$ dan $R \text{ Square} = ,339$ atau 33,9%) menjadi kuat.

Berdasarkan pembahasan dan diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik secara langsung, dan juga signifikan berpengaruh terhadap partisipasi politik peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini secara tegas mendukung temuan dari penelitian-penelitian terdahulu, serta sesuai dengan hasil kajian para ahli tentang pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik.

Pengaruh Efikasi Politik terhadap Partisipasi Politik Peserta Kegiatan Fasilitas Pendidikan Politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terungkap bahwa tingkat efikasi politik berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik, peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Efikasi politik dalam penelitian ini dikonstruksi dan diukur dari dua indikator efikasi, yakni: efikasi internal dan efikasi eksternal dengan menggunakan dua belas butir item pertanyaan. Menurut Bandura, keyakinan diri (*self efficacy*) merupakan bagian dari teori kognitif sosial (Bandura, 2011). Teori ini merujuk kepada keyakinan individu akan kemampuannya dalam mengerjakan tugas yang dipercayakannya. *Self efficacy* dapat menciptakan lingkaran positif, dan memiliki keyakinan diri yang tinggi sehingga mampu mencapai tujuannya melalui tindakan yang dilakukannya.

Pengaruh efikasi politik terhadap partisipasi politik peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dibuktikan dengan penolakan terhadap H_{03} , yaitu: tidak ada pengaruh efikasi politik terhadap partisipasi politik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan efikasi politik telah terbukti secara signifikan mempengaruhi partisipasi politik peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Sehingga, H_{a2} penelitian yakni: ada pengaruh efikasi politik terhadap partisipasi politik diterima.

Efikasi politik yang terbentuk dalam diri para peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, bersumber dari pendidikan politik yang telah mereka terima atau lalui dan juga alami selama beberapa waktu dalam kehidupannya. Efikasi politik internal peserta tersebut tercermin dalam: memahami isu-isu politik yang sedang berkembang di masyarakat; percaya diri untuk berdiskusi tentang topik politik dengan orang lain; merasa mampu membedakan informasi politik yang benar dan yang menyesatkan; tahu bagaimana proses pengambilan keputusan di pemerintahan berlangsung; merasa memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai kebijakan publik; serta yakin suara yang memiliki nilai dalam proses politik.

Sementara efikasi politik eksternal peserta tercermin melalui: percaya bahwa aspirasi masyarakat diperhatikan oleh para pemimpin politik; yakin bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dari warga negara; percaya bahwa proses politik memberi ruang bagi partisipasi publik; merasa tindakan saya, seperti memilih atau memberi masukan, dapat mempengaruhi kebijakan; melihat bahwa keputusan politik sering mencerminkan kebutuhan masyarakat; serta percaya bahwa politisi memperhatikan suara rakyat saat membuat kebijakan.

Tingginya tingkat efikasi politik peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, juga dipengaruhi oleh pendidikan yang pernah ditempuh. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang pernah ditempuh para peserta kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka semakin tinggi pula tingkat efikasi politiknya. Begitu pun sebaliknya, apabila semakin rendah jenjang pendidikan yang pernah ditempuh maka semakin rendah pula tingkat efikasi politik yang dapat dimilikinya. Hal ini disimpulkan dari peserta dengan pendidikan yang pernah ditempuh berkategori tinggi, yakni: Pascasarjana (S2/S3) ternyata memiliki tingkat efikasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang menempuh jenjang pendidikan yang lebih rendah.

Menurut (Barrett & Pachi, 2019) indikator untuk menilai efikasi politik seseorang antara lain sebagai berikut: Pertama, efikasi politik internal (*internal political efficacy*), merujuk

pada keyakinan individu bahwa dirinya mampu memahami isu-isu politik dan berpartisipasi secara efektif dalam aktivitas politik. Kedua, efikasi politik eksternal (*external political efficacy*) merujuk pada keyakinan individu bahwa politisi, pejabat yang berkuasa, dan lembaga negara responsif terhadap tuntutan serta harapan warga negara. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Lane bahwa secara umum ada dua dimensi dari efikasi politik, yaitu: efikasi politik internal dan efikasi politik eksternal (Lane, 1959). Efikasi politik internal adalah persepsi bahwa orang bisa memahami politik dan secara kompeten berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sedangkan efikasi eksternal adalah keyakinan bahwa pejabat publik dan lembaga politik berada responsif terhadap tuntutan warga.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka praktis terdapat keterkaitan antara efikasi politik dengan partisipasi politik. (Barrett & Pachi, 2019) dan (Lane, 1959) di atas menyatakan bahwa terdapat dua dimensi dalam efikasi politik, yaitu: efikasi politik internal dan eksternal. Sebelumnya, (Bandura, 2011) menegaskan bahwa keyakinan diri (*self efficacy*) merupakan bagian dari teori kognitif sosial. Teori ini merujuk kepada keyakinan individu akan kemampuannya dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya. *Self efficacy* dapat menciptakan lingkaran positif, dan memiliki keyakinan diri yang tinggi sehingga mampu mencapai tujuannya melalui tindakan yang dilakukannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Gani, Daud, & Ridfah, 2022) tentang efektifitas modul pendidikan politik terhadap peningkatan efikasi politik dan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Barru. Penelitian yang dilakukan Gani, dkk tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor dari kelompok siswa sebelum (*pre test*) dan sesudah (*post test*) diberikan materi terkait politik menggunakan modul yang dilatihkan dengan meningkatnya efikasi politik yang dimiliki. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan dari (Putra, 2021) yang menyebutkan bahwa dalam masyarakat yang multi etnis efikasi politik berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan pembahasan dan diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa efikasi politik secara langsung, dan juga signifikan berpengaruh terhadap partisipasi politik peserta kegiatan

fasilitasi pendidikan politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini secara tegas mendukung temuan dari penelitian-penelitian terdahulu, serta sesuai dengan hasil kajian para ahli tentang pengaruh efikasi politik terhadap partisipasi politik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan diskusi penelitian dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Tingkat partisipasi politik peserta pasca kegiatan fasilitasi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan rata-rata yang tinggi dengan skor rata-rata 3,74 atau 74,80. Partisipasi politik peserta pasca kegiatan fasilitasi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, terbukti mendapatkan pengaruh secara positif dan signifikan dari tingkat pendidikan politik serta tingkat efikasi politik. Kontribusi variabel pendidikan politik dan efikasi politik secara bersamaan terhadap partisipasi politik peserta pasca kegiatan fasilitasi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sebesar 47%, dimana 53% lainnya tidak diteliti dalam penelitian ini.

Indikator variabel pendidikan politik memberikan kontribusi, bagi perkembangan teori-teori demokrasi khususnya partisipasi politik masyarakat. Dalam penelitian ini indikator pendidikan politik yang terkuat adalah X2 dengan pernyataan “Saya dapat menguraikan peran politik dalam kehidupan bermasyarakat” sebesar 52,75% responden. Sedangkan indikator variabel pendidikan politik yang terkecil adalah X5 dengan pernyataan “Saya aktif mengikuti diskusi atau forum mengenai isu-isu politik” yang hanya sebesar 41% responden. Hal ini menegaskan pendidikan politik merupakan hal yang perlu untuk konsisten dilaksanakan, terutama oleh lembaga-lembaga demokrasi dan tidak hanya dibebankan kepada partai politik.

Indikator variabel efikasi politik memberikan kontribusi, bagi perkembangan teori-teori demokrasi khususnya partisipasi politik masyarakat. Dalam penelitian ini indikator efikasi politik yang terkuat adalah Z1 dengan pernyataan “Saya memahami isu-isu politik yang sedang berkembang di masyarakat” sebesar 50,75% responden. Sedangkan indikator variabel efikasi politik yang terkecil adalah Z11 dengan pernyataan “Saya melihat bahwa keputusan politik sering mencerminkan kebutuhan masyarakat” yang hanya sebesar

41,5% responden. Hal ini menegaskan bahwa efikasi politik memang mempengaruhi partisipasi politik, meskipun dengan signifikansi yang tidak terlalu kuat. Selain itu pendidikan politik tidak selalu berpengaruh terhadap meningkatnya efikasi politik, karena terdapat karakteristik sosial tertentu yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan.

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka beberapa saran yang dapat disampaikan terkait penelitian ini adalah: Secara garis besar penelitian ini hanya melihat pengaruh pendidikan politik dan efikasi politik terhadap partisipasi politik. Kontribusi variabel pendidikan politik dan efikasi politik terhadap partisipasi politik yang hanya 47%, menjadikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan karakteristik sosial seperti: umur, tingkat pendidikan, maupun rata-rata pendapatan kotor per bulan. Ketiga karakteristik sosial ini menunjukkan korelasi yang erat dengan setiap variabel penelitian.

Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi politik tidak selalu diukur, atau dilihat dengan kehadiran individu saat pemberian suara pada hari pemilihan/pemungutan suara (*voter turnout*). Kelima indikator partisipasi politik dengan dua belas butir item pertanyaan yang dikonstruksi, memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik di dalam menjelaskan fenomena terkait partisipasi politik. Sehingga, untuk kedepannya para peneliti lain dapat menggunakannya dalam pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan sehubungan dengan partisipasi politik.

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selaku pihak penyelenggara kegiatan fasilitasi pendidikan politik, diharapkan lebih memperhatikan model, kurikulum, serta desain kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah yang masih mayoritas dihuni etnis Minangkabau dengan prinsip, kearifan lokal, serta filosofi hidup yang kuat terhadap berbagai aspek kehidupannya termasuk dalam dunia politik dan pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi ke depan dapat juga menggunakan kemajuan teknologi agar dapat memastikan kehidupan demokrasi di Sumatera Barat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (2011). On the Functional Properties of Perceived Self-Efficacy Revisited. *Journal of Management, Vol. 38, No. 1, January*.
- Barrett, M., & Pachi, D. (2019). *Youth Civic and Political Engagement*. New York: Routledge.
- Brody, R. A. (1978). The Puzzle of Political Participation in America. *The New American Political System*.
- Gani, M. H., Daud, M., & Ridfah, A. (2022). Efektifitas Modul Pendidikan Politik terhadap Efikasi Politik dan Partisipasi Politik Siswa SMA di Kabupaten Barru. *Metapsikologi: Jurnal Ilmiah Kajian Psikologi, Vol. 1, No. 1, November*.
- Hendrik, D. (2010). Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Demokrasi, Vol. IX, No. 2*.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- International IDEA. (2020). *The Global State of Democracy*. Stockholm: IDEA.
- Kartono, K. (1996). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 1, No. 7*.
- Lane, R. E. (1959). *Political Life: Why People Get Involved in Politics*. New York: Free Press.
- Limilia, P., & Fuady, I. (2017). Pencarian Informasi Topik Politik di Kalangan Pemilih Pemula (Studi Kasus Pola Pencarian Informasi Politik Pada mahasiswa Fikom Unpad) . *Konferensi Nasional Komunikasi 2015* (pp. 1-10). Bandung: Konferensi Nasional Komunikasi 2015.
- Mas'oed, M., & Andrews, C. M. (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasuha, C. N., & Cholikh, C. A. (2019). Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada (Studi Pada Pilkada Bupati di Kabupaten Kuningan). *Syntax Idea: Vol. 1, No. 8, Desember*.
- Niemi, R. G., & Junn, J. (1988). *Civic Education: What Makes Students Learn*. New Have: Yale University Press.
- Nurfitri, A. D. (2018). *Hubungan antara Efikasi Politik dan Kepercayaan Politik dengan Partisipasi Politik Daring pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial di Kota Semarang*. Semarang: Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata.
- OECD. (2018). *The Future of Civic Education*. Paris: OECD Publishing.
- Print, M., & Lange, D. (2012). *Schools, Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizens*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Putra, R. P. (2021). *Pengaruh Political Trust, Efikasi Politik Dan Kandidat Terhadap Partisipasi Politik, Masyarakat Multi Etnis Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019*. Padang: Program Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas.
- Rosenstone, S. J., & Hansen, J. M. (1993). Mobilization, Participation, and Democracy in America. *American Political Science Review, Vol. 83, Issue 3, September*.
- Sari, N., & Rahmadi, M. (2021). Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Partisipasi Politik di Kalimantan Selatan. *Jurnal Civic Education, Vol. 5, No. 1*.
- Setiawan, A. (2022). Peran Kesbangpol dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Daerah. *Jurnal Demokrasi Indonesia, Vol. 4, No. 1*.

Singarimbun, M. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Solijonov, A. (2016). *Voter Turnout Trends around The World*. Stockholm: International IDEA.

Sugiarto, Siagian, D., Sunaryanto, L. T., & Utomo, D. S. (2003). *Teknik Sampling*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunaryo, U. P. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pembangunan. *Politico: Vol. 8, No, 2*, 1-15. Retrieved from ejournal.unsrat.ac.id.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. London: Harvard University Press.

Wibowo, K. A., Rahmawan, D., & Syafaat, A. H. (2020). Efikasi Politik dan Jenjang Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 8, No. 2, Desember*, 152-165.

Wirawan, I. (2020). Integrasi Nilai Budaya Lokal dalam Pendidikan Politik di Bali. *Jurnal Demokrasi Indonesia, Vol. 12, No. 3*.